**BAB V**

**VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

* 1. **Visi**

Visi Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, yaitu:

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, BERMASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Bermasyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan agamis. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

* 1. **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;

Dalam menjabarkan Visi Daerah, Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Temanggung karena Sektor Pertanian diharapkan dapat menjadi sektor tumpuan kehidupan masyarakat. Sektor Pertanian yang dimaksud adalah meliputi sub sektor pertanian, sub sektor perikanan, dan sub sektor kehutanan.

Pengembangan pertanian yang moderen didukung oleh pengembangan di sektor perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, berupa pengembangan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata.

Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri merupakan bentuk integrasi pengembangan pertanian (pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan) dengan pengembangan industri pertanian dari hulu sampai dan hilir yang didukung dengan pengembangan sektor-sektor jasa yang terkait dengan pengembangan pertanian. Sedangkan pengembangan Agrowisata merupakan upaya pengembangan pariwisata yang berbasis pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah diarahkan pula pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mampu bersaing secara kompetitif. Pengembangan potensi lokal tersebut adalah juga dalam rangka menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, dikarenakan komoditas yang memiliki keungulan komparatif tersebut memiliki *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap sektor yang lain.

Kebijakan pembangunan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, dan juga didukung oleh pengembangan di sektor koperasi dan UMKM.

1. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Visi Daerah juga mengamanatkan harapan terwujudnya masyarakat yang agamis, berbudaya, dan sejahtera baik di perdesaan maupun perkotaan. Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tersebut juga meliputi kesejahteraan sosial, ketertiban dan ketentraman masyarakat, tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha baik di daerah maupun di lain daerah, terciptanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meningkatnya peran pemuda, dan berkembangnya olahraga di Kabupaten Temanggung.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diharapkan juga tetap melibatkan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga pemberdayaan masyarakat juga merupakan salah satu hal yang disentuh melalui misi ini.

Upaya untuk menjaga budaya dan kebudayaan juga merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Budaya dan Kebudayaan yang terjaga diharapkan mampu tercipta karakter khusus di masyarakat Kabupaten Temanggung yaitu masyarakat yang berbudaya.

Seluruh harapan yang ada tersebut akan sangat terdukung jiak tercipta pula kehidupan masyarakat yang agamis, diantaranya dengan adanya peningkatan keimanan umat beragama, tersedianya sarana dan prasara keagamaan, dan toleransi antar umat beragama

1. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;

Upaya untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berwawasan lingkungan, baik diperdesaan dan perkotaan, didukung oleh pengembangan insfrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sarana perhubungan, pengembangan sanitasi lingkungan, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah, dan pengembangan perumahan dan kawasan perumahan itu sendiri.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai makna bahwa segala pembangunan yang dilaksanakan saat ini dan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia saat ini diharapkan tidak mengurangi kesempatan bagi generasi mendatang untuk melakukan pembangunan yang juga memanfaatkan sumberdaya di masa datang.

1. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;

Pendidikan merupakan satu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan, dan selalu memperoleh perhatian lebih dari pemerintah. Pendidikan yang baik dan dapat diakses oleh semua masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik yang bermuara pada peningkatan kapasitas intelektual masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih luas maupun meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Pendidikan yang dikembangkan juga tidak terlepas dari kearifan lokal di Kabupaten Temanggung, sehingga akan diberikan sebuah materi pendidikan berupa pendidikan budi pekerti, pendidikan budaya jawa, dan pendidikan lain yang mengacu pada kearifan lokal yang ada.

1. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga merupakan satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah. Kegiatan pembangunan niscaya tidak akan terlaksana dengan maksimal andaikata tidak didukung oleh kualitas kehidupan masyarakat yang baik.

Pemerataan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan menjadi hal utama yang diperhatikan di misi ini, dengan harapan bahwa pemerataan akses tersebut juga didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia kesehatan.

Satu hal lain yang ingin diwujudkan adalah bahwa kesehatan akan mampu menjadi budaya di masyarakat, baik kesehatan pribadi, maupun kesehatan lingkungan. Sehingga muncul kesadaran masyarakat untuk membudayakan hidup sehat dilingkungan masing-masing.

1. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik, atau dalam kata lain *Good Government and Clean Governance* maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM Aparatur, sehinga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan.

Upaya tersebut diatas sekaligus menjadi rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013-2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

**“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”**

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

* 1. **Tujuan dan Sasaran**

Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Penjabaran ke dalam Tujuan dan Sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pelaksanaan Visi dan Misi Daerah.

Adapun penjabaran Visi dan Misi beserta keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018

| VISI | MISI | | TUJUAN | | SASARAN | | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA | | TARGET INDIKATOR KINERJA | | | | | KONDISI AKHIR RPJMD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2018* |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 1 | Mewujudkan Peningkatan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan | 1 | Meningkatkan penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian | 1 | Meningkatnya penerapan teknologi, dan inovasi Pertanian | Besaran Kelompok Tani yang menerapkan teknologi dan informasi pertanian dan perkebunan melalui sekolah lapang | Kelompok | 500 | 600 | 720 | 850 | 990 | 1140 | 1300 | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Penerapan Pertanian dan Perkebunan Mengarah Organik untuk Komoditas Utama | Ha | 200 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1000 | 1300 | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Peningkatan Jumlah Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan | Unit | 882 | 1022 | 1072 | 1122 | 1172 | 1222 | 1272 | 1272 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kelahiran anak sapi (pedet) melalui Inseminasi Buatan | % | 59,76 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  | 2 | Meningkatnya penerapan teknologi, inovasi peternakan | Persentase Peningkatan Penggunaan Bibit dan benih unggul | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian | Kelompok | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  | 3 | Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian | Persentase Penanganan Serangan Hama Penyakit | % | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
|  |  |  |  |  | 4 | Meningkatnya kualitas hasil produksi pertanian, perkebiunan dan peternakan | Angka Kematian Ternak unggas | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Ternak kecil | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Ternak besar | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan Diversifikasi Produk Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 5 | Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi tanaman pertanian dan perkebunan | Peningkatan produktifitas Padi | Ton/Ha | 6,15 | 5.67 | 6,19 | 6,38 | 6,58 | 6,78 | 6,99 | 6,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Jagung | Ton/Ha | 5,6 | 5,6 | 5,77 | 6,03 | 6,30 | 6,58 | 6,88 | 6,88 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Ubi kayu | Ton/Ha | 24,48 | 25,01 | 25,51 | 26,02 | 26,54 | 27,07 | 27,61 | 27,61 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi Cabai | Ton/Ha | 4,02 | 6.15 | 6.16 | 6.2 | 6,30 | 6,50 | 6,70 | 6,70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Kobis | Ton/Ha | 23,90 | 24,50 | 24,99 | 25,49 | 26,00 | 26,52 | 27,05 | 27,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Tembakau | Ton/Ha | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Kopi Robusta | Ton/Ha | 1,1 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produktifitas Kopi Arabika | Ton/Ha | 0,95 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Produktivitas daging Sapi | Kg/Ekor | 159 | 160 | 163,20 | 166,46 | 169,79 | 173,19 | 176,65 | 176.65 |
|  |  |  |  |  | 6 | Meningkatnya produktivitas ternak | Peningkatan Produktivitas daging Kambing | Kg/Ekor | 12.5 | 13 | 13,13 | 13,26 | 13,39 | 13,53 | 13,66 | 13,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Produktivitas daging Domba | Kg/Ekor | 12.5 | 13 | 13,13 | 13,26 | 13,39 | 13,53 | 13,66 | 13,66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi telur ayam ras petelur | Butir | 75.335.043 | 75.408.960 | 76.163.949 | 76.924.680 | 77.693.926 | 78.470.866 | 79.255.574 | 79.255.574 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan populasi sapi | Ekor | 43515 | 26946 | 27484 | 28034 | 28595 | 29167 | 29750 | 29750 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan populasi domba | Ekor | 270497 | 275055 | 286057 | 297499 | 309399 | 321775 | 334646 | 334646 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan populasi kambing | Ekor | 58732 | 59769 | 60665 | 61575 | 62499 | 63436 | 64388 | 64388 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan populasi ayam buras | Ekor | 1658993 | 1659079 | 1662397 | 1665721 | 1669053 | 1672391 | 1675736 | 1675736 |
|  |  |  |  |  | 7 | Meningkatnya Penyelenggaraan Penyuluhan | Jumlah materi penyuluhan yang dipublikasikasi | kali/tahun | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Jumlah peningkatan kapasitas SDM Penyuluh | orang/thn | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio jumlah kelompok tani maju dengan jumlah total kelompok tani kali 100 % | % | 7.142857143 | 7.142857143 | 8.051948052 | 8.051948052 | 8.051948052 | 8.051948052 | 8.051948052 | 8.051948052 |
|  |  |  |  |  |  |  | Jumlah peningkatan kapasitas SDM Petani | orang/thn | 0 | 0 | 2480 | 4960 | 7440 | 9920 | 12400 | 12400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pertumbuhan dan peningkatan kapasitas Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) | % | 16.26 | 27.34 | 35.99 | 46.37 | 58.46 | 72.32 | 87.89 | 87.89 |
|  |  |  |  |  |  |  | Jumlah pertumbuhan dan peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani | unit/thn | 3 | 1 | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 70 |
|  |  |  | 3 | Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan. | 8 | Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Insfrastruktur Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan | Persentase meningkatnya pengelolaan kawasan embung | % | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah jaringan irigasi usaha tani terbangun | unit | 119 | 219 | 269 | 319 | 369 | 419 | 469 | 469 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah jalan usaha tani | unit | 100 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 410 |
|  |  |  | 4 | Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah | 9 | Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agropolitan | Persentase Perkembangan Kawasan Agropolitan | % | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Perikanan | 10 | Meningkatnya Penerapan Teknologi Perikanan | Penggunaan induk ikan unggul | % | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi benih ikan | Ekor | 53088000 | 69200000 | 76120000 | 83732000 | 92105200 | 102236750 | 113482800 | 113482800 |
|  |  |  |  |  | 11 | Meningkatnya Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Diversifikasi Produk Perikanan | Peningkatan produksi ikan konsumsi (kolam) | Ekor | 1.864,08 | 2.302,14 | 2854.65 | 3539.77 | 4389.32 | 5442.75 | 6749.01 | 6749.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi mina padi | Ekor | 1152.26 | 1423.99 | 1765.75 | 2189.53 | 2715.01 | 3366.62 | 4174.6 | 4174.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Produktivitas benih ikan | ekor/m2 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  | Produktivitas ikan konsumsi | kg/m2 | 1,58 | 1,93 | 2.36 | 2.89 | 3.54 | 4.33 | 5.29 | 5,29 |
|  |  |  |  |  |  |  | Produktivitas mina padi | kg/Ha/tahun | 375,76 | 455,26 | 551.58 | 668.28 | 809.67 | 980.97 | 1188.51 | 1188,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan | Kg | 183 | 196 | 210 | 224 | 240 | 258 | 277 | 277 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Konsumsi Ikan | kg/kapita/tahun | 14.96 | 15.25 | 15.56 | 15.87 | 16.19 | 16.53 | 16.87 | 16,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan luas lahan budidaya ikan | Ha | 117,88 | 119,17 | 120,19 | 121,39 | 122,61 | 123,83 | 125,07 | 125,07 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum | Ton | 121.28 | 166,16 | 227.64 | 311.87 | 427.26 | 585.34 | 801.92 | 801.92 |
|  |  |  | 6 | Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah | 12 | Meningkatnya ketahanan pangan | Cakupan Ketersediaan Energi per Kapita | kkal/kap/hr | 2846.55 | 2794.62 | 2800 | 2850 | 2900 | 2940 | 2980 | 2980 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Ketersediaan protein per Kapita | gr/kap/hr | 74.99 | 70.88 | 73.54 | 74 | 74.75 | 75.5 | 75,99 | 75,99 |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan cadangan pangan masyarakat | unit | 29 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah | % | 2.6 | 8,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | % | 88 | 88.5 | 89 | 90 | 90.45 | 90.85 | 91 | 91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | % | - | - | 60 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Desa Mandiri Pangan | Desa | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan | lokasi | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan | % | 66.67 | 66.67 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 8 | Meningkatkan Pengembangan Agroindustri Berbasis Sumber Daya Lokal | 14 | Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah | % | 54.83747853 | 54.83747853 | 54.87341772 | 55.24290221 | 55.28301887 | 55.51097179 | 55.6 | 55.6 |
|  |  |  |  |  | 15 | Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh | % | 99.4847656 | 99.54837479 | 99.62025316 | 99.68454259 | 99.68553459 | 99.71786834 | 99.75 | 99.75 |
|  |  |  | 9 | Meningkatkan Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Unggulan Daerah | 16 | Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan | Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan | unit | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 17 | Meningkatnya Daya Saing Produk | Cakupan Nilai Ekspor produk daerah | ($) | 108406133.6 | 150927864.9 | 155000000 | 160000000 | 165000000 | 170000000 | 175000000 | 175000000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan promosi produk unggulan daerah | kali | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal | org | 120 | 120 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 600 |
|  |  |  |  |  | 18 | Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen) | Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya | laporan | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar | produk | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang | unit | 16601 | 16.77 | 18823 | 18879 | 18936 | 18993 | 19050 | 19050 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase penyelesaian sengketa konsumen | % | - | - | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 85 |
|  |  |  | 10 | Meningkatkan Peran Sektor Pendukung Pengembangan Agribisnis, Agroindustri, dan Agrowisata | 20 | Meningkatnya Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi dan UMKM | prosentase jumlah koperasi aktif | % | 79.1322314 | 83.47107438 | 86.57024793 | 87.60330579 | 88.63636364 | 89.66942149 | 90.70247934 | 90.70247934 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah anggota koperasi | org | 149906 | 154700 | 159670 | 165500 | 170800 | 174500 | 179500 | 179500 |
|  |  |  |  |  |  |  | persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi | % | 36.7768595 | 38.2231405 | 40.2892562 | 43.38842975 | 46.48760331 | 48.55371901 | 53.71900826 | 53.71900826 |
|  |  |  |  |  | 21 | Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM | Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | % | - | - | - | 25 | 50 | - | - | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah UKM yang dibina | Kelompok | 0 | 63 | 132 | 204 | 281 | 364 | 451 | 451 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM | Kelompok | 0 | 132 | 152 | 172 | 192 | 212 | 232 | 232 |
|  |  |  | 11 | Meningkatkan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah | 22 | Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah | Besaran Penurunan Lahan kritis | Ha | 18619 | 26581 | 23581 | 20581 | 17581 | 14581 | 11581 | 11581 |
|  |  |  |  |  | 23 | Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Lahan | Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup | % | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Peningkatan Kemitraan dalam Pengelolaan Hasil Hutan | Kelompok | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Meningkatnya konservasi hutan dan lahan | unit | 80 | 120 | 150 | 187.5 | 234.375 | 292.96875 | 366.2109375 | 366.2109375 |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 2 | Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera | 1 | Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan | 1 | Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase anak terlantar yang tertangani | % | 0.76 | 0.93 | 0.93 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial | % | 2.7 | 2.7 | 2.88 | 3.08 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial | % | 0.94 | 0.94 | 2.71 | 2.71 | 4.6 | 4.78 | 5.06 | 5.06 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis | % | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 1 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni | % | 4,32 | 4,34 | 8,34 | 12,34 | 16,34 | 20,34 | 24,34 | 24,34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2 | Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial | Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial | % | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 24.22 | 25.61 | 25.95 | 25.95 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran | 3 | Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran | Persentase Perlindungan Sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 3 | Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 4 | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 4 | Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja | 5 | Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat | % | - | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan | % | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  | 6 | Meningkatknya Kesempatan Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran | Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan Kerja | % | 63 | 21 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Kesempatan Kerja | % | 96,60 | 94.53 | 94.75 | 95 | 95.25 | 95.5 | 95.75 | 95.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,40 | 5.47 | 5.25 | 5 | 4.75 | 4.5 | 4.25 | 4.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 77,41 | 76.87 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
|  |  |  |  |  | 7 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | % | 9.3 | 9.3 | 13.3 | 14 | 16 | 18 | 19.4 | 19.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pekerja atau Buruh yang Menjadi peserta Program Jamsostek/Program Sejenis | % | - | 62.4 | 65.5 | 65.5 | 80 | 90 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Kasus yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pengujian Peralatan diperusahaan | % | - | 64 | 67.5 | 73 | 76 | 78 | 82 | 82 |
|  |  |  | 5 | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan | 8 | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan | Cakupan peningkatan klasifikasi tipe desa | % | n.a | n.a | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif ( BUMDes, Pasar Desa , UED-SP, Lumbung Pangan ) | % | 12 | 12 | 28 | 34 | 50 | 65 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Menurunnya Rumah Tangga Sasaran (Angka Kemiskinan) | % | 17.79 | 17,27 | 15.6 | 14.4 | 13.3 | 12.2 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemberdayaan masyarakat dalam Teknologi Tepat Guna | % | 5 | 9 | 14 | 19 | 23 | 28 | 33 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan bantuan Rumah Layak Huni bagi Rumah Tangga Sasaran | % | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.26 | 1.35 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Partisipasi Rumah Tangga Sasaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan | % | 0 | 48 | 69 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 6 | Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi | 9 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Transmigrasi | Persentase Penempatan Transmigran | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 7 | Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 10 | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 88 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Pukesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum | % | 90 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 80 | 80 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | % | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Kekerasan dalam rumah tangga | Rasio | 1 : 2182 | 1 : 2401 | 1 : 2401 | 1 : 2500 | 1 : 2500 | 1 : 2600 | 1 : 2600 | 1 : 2600 |
|  |  |  |  |  |  |  | Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender | % | 4,2 | 29,2 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 |
|  |  |  | 8 | Meningkatkan kesetaraan gender | 11 | Meningkatknya kesetaraan gender | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan | % | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|  |  |  |  |  | 12 | Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar | % | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya | % | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus | % | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
|  |  |  | 9 | Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Olagraga | 13 | Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga | Besaran kegiatan kepemudaan | Kegiatan | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  | 14 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga | Cakupan Bantuan Prasarana Olah Raga Bagi Klub Olah Raga | % | 3.992015968 | 5.489021956 | 7.48502994 | 9.98003992 | 12.9740519 | 16.46706587 | 20.45908184 | 20.45908184 |
|  |  |  |  |  | 15 | Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Atlit Olahraga | Kegiatan olah raga | Kali | 70 | 80 | 80 | 81 | 80 | 82 | 85 | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Prestasi Olahraga | Jumlah Medali | 71 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Prestasi Kegiatan Kepemudaan | Jumlah Prestasi | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  |  |  | 10 | Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan | 16 | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan | Cakupan Pemberian Bantuan Tempat Ibadah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Pondok Pesantren | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada TPQ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemberian Bantuan Kepada Madrasah Diniyah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 11 | Mengembangkan dan Melestarikan Kebudayaan Daerah | 17 | Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Nilai Tradisi Budaya | % | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemeliharaan Benda-benda Bersejarah dan Arkeologi | 0 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |
|  |  |  |  |  | 18 | Meningkatnya Promosi Seni dan Cagar Budaya | Cakupan Kajian Seni | % | 6.6 | 13.3 | 20 | 26.6 | 26.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Fasilitas Seni | % | 42.8 | 42.8 | 57.1 | 57.1 | 71.4 | 71.4 | 85.7 | 85.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Gelar Seni | % | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Misi Kesenian | % | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian | % | 50 | 50 | 50 | 62.5 | 75 | 75 | 87.5 | 87.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Tempat Kesenian | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Organisasi Kesenian | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 12 | Meningkatkan Sarana Budaya dan Kebudayaan | 19 | Meningkatnya Sarana Budaya dan Kebudayaan | Cakupan Fasilitas Cagar Budaya | % | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Promosi Cagar Budaya | % | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.63 | 0.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budaya dan Kebudayaan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 13 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Politik, Wawasan Kebangsaan, Keamanan, dan Ketertiban | 20 | Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik dan Wawasan Kebangsaan | Persentase Peserta Kegiatan Politik Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Kasus Pekat yang Tertangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Partisipasi Pemilih | % | - | 86 | - | - | - | - | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penurunan Kasus SARA | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Tindak Penyalahgunaan Narkotika | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 21 | Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan | Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | % | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kriminalitas | angka | 0,46 | 0,40 | 0,5 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penanganan demonstrasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | kali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) | Rasio | 1,64 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 3 | Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan | 1 | Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebagai penunjang perekonomian | 1 | Meningkatnya sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Memadai | Persentase Jalan yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara dengan Selamat | % | 74.7 | 69.7 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan Insfrastruktur Sumber Daya Air untuk peningkatan produkivitas perekonomian | 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana Insfrastruktur Sumber Daya Air | Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Partisipatif | % | 3.492063492 | 4.603174603 | 4.920634921 | 5.238095238 | 5.555555556 | 5.873015873 | 6.19047619 | 6.19047619 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan | % | 30.54 | 30.71 | 30.9 | 40.1 | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai | Unit | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  | 3 | Meningkatkan pelayanan pemerintahan | 3 | Meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui ketersediaan banguanan instansi pemerintah | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 94.3 | 94.6 | 94.92 | 95.24 | 95.56 | 95.88 | 96.2 | 96.2 |
|  |  |  | 4 | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman untuk mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau | 4 | Meningkatnya Rumah Sehat dan Layak Huni | berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan | Hektar (Ha) | 35.56 | 35.56 | 32.36 | 28.81 | 25.42 | 22.3 | 19.91 | 19.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Air Minum yang layak | % | 74.48 | 82.48 | 84.5 | 86.6 | 88.1 | 90.2 | 91.3 | 91.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan sanitasi pemukiman yang layak | % | 70.71 | 74.28 | 74.9 | 75.51 | 76.1 | 77.4 | 78.9 | 78.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota | % | 3.8 | 5.8 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum | % | 3,46 | 16,26 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 76 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten | % | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 5 | Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | 5 | Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana | Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) | % | 39 | 68 | 70 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi | % | 71 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | % | 70.6 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 95 |
|  |  |  | 6 | Mewujudkan Penataan Ruang yang Memperhatikan Keberlanjutan Sumber Daya Wilayah | 6 | Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukkannya | tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) beserta rencana rincinya | PERDA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya | % | 100 | 87.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan tindakan awal terhadap pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang | % | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik pada skala kawasan/kota | % | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 30 | 30.25 | 30.5 | 31.25 | 31.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian | % | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan (TPST 3R) | % | 2.21 | 2.9 | 4.9 | 7.5 | 9.8 | 11.2 | 14.5 | 14.5 |
|  |  |  | 7 | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Prinsip Pembengunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan | 7 | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan | Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah se-Kab. Temanggung | % | 10.38 | 10.35 | 12,50 | 13 | 13,50 | 14 | 14,50 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proporsi Sampah Terangkut terhadap Produksi Sampah Ibukota Kabupaten (Kecamatan Temanggung) | % | 76 | 80 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung) | % | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Terwujudnya TPA Temanggung wilayah Utara | unit | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Usaha dan atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 8 | Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup | Persentase Usaha dan atau Kegiatan sumber yang Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara | % | 87,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Luas Lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya | % | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Perusahaan yang Memiliki Dokumen UKL, UPL, dan AMDAL | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | terbangunnya sumber energi alternatif terbarukan | unit | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
|  |  |  | 8 | Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup | 9 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Energi dan Pertambangan Mineral | Persentase Kendaraan yang Diuji | % | 81.4 | 90.2 | 91.4 | 92.3 | 93.7 | 94.3 | 95 | 95 |
|  |  |  | 9 | Meningkatkan Ketersediaan Pelayanan Transportasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 10 | Meningkatnya Transportasi Masyarakat yang Memadai | Persentase keselamatan angkutan umum | % | 81.4 | 90.2 | 91.4 | 92.3 | 93.7 | 94.3 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe b) | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya sub terminal (tipe c) | Unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan | % | 50 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan | % | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan | % | 50 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan perusahan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 4 | Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal | 1 | Meningkatkan Budi Pekerti, Tata Krama Nilai Budaya dan Keteladanan | 1 | Meningkatnya Budi Pekerti, Tata Krama dan Tata Nilai Budaya Jawa serta Keteladanan | Tersusun dan terlaksananya kurikulum muatan lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa | % | - | - | - | 32.73 | 61.78 | 86.33 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase siswa yang memiliki Buku Teks atau Buku Penunjang atau Buku Pengayaan yang Memuat Budi Pekerti atau Tata Krama atau Nilai Budaya Daerah atau Keteladanan | % | - | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase pendidik yang disiplin | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase angka kenakalan siswa | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat atas Pelayanan Pendidikan | 2 | Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun) | % | 62.54 | 66.13 | 67.13 | 67.63 | 68.13 | 68.63 | 69.13 | 69.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun) | % | 32.32 | 32.36 | 32.4 | 32.44 | 32.48 | 32.52 | 32.56 | 32.56 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 4-6 Tahun) | % | 48.61193734 | 48.61 | 48.64 | 48.67 | 48.7 | 48.73 | 48.76 | 48.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Partisipasi Anak Perempuan (Usia 0-6 Tahun) | % | 49.07150326 | 49.07 | 49.09 | 49.111 | 49.13 | 49.15 | 49.17 | 49.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio siswa per kelas TK | Rasio | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  | 3 | Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan Dasar | Persentase APK SD Sederajat | % | 103.5 | 103.55 | 103.58 | 103.61 | 103.64 | 103.67 | 103.7 | 103.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase APM SD Sederajat | % | 95.4 | 95.42 | 95.45 | 95.48 | 95.51 | 95.54 | 95.57 | 95.57 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase APK SMP Sederajat | % | 96 | 96.03 | 96.06 | 96.09 | 96.12 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase APM SMP Sederajat | % | 83.63 | 83.66 | 83.69 | 83.72 | 83.75 | 83.78 | 83.81 | 83.81 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Melanjutkan ke SMP Sederajat | % | 95.34094966 | 95.37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Dasar | % | 48.59446281 | 48.59 | 48.61 | 48.63 | 48.65 | 48.67 | 48.69 | 48.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Kelas SD/MI | Angka | 21.06 | 21.06 | 21.8 | 21.1 | 21.12 | 21.14 | 21.16 | 21.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Kelas SMP/MTs | Angka | 31.9 | 31.9 | 31.92 | 31.94 | 31.96 | 31.98 | 32 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Dasar | % | 65,62 | 68,13 | 70,65 | 71,90 | 73,16 | 74,42 | 74,42 | 74,42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun | % | 99.37 | 99.37 | 99.4 | 99.43 | 99.46 | 99.49 | 99.52 | 99.52 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun | % | 99.25 | 99.25 | 99.28 | 99.31 | 99.34 | 99.37 | 99.4 | 99.4 |
|  |  |  |  |  | 4 | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Menengah | Persentase APK Pendidikan Menengah | % | 56.56 | 56.66 | 56.76 | 56.86 | 56.96 | 57.06 | 57.16 | 57.16 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase APM Pendidikan Menengah | % | 39.55 | 39.65 | 39.75 | 39.85 | 39..95 | 40.05 | 40.15 | 40.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Melanjutkan ke Jenjang Pendidikan Menengah | % | 65.47914085 | 65.57 | 65.66 | 65.75 | 65.84 | 65.93 | 66.02 | 66.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Partisipasi Anak Perempuan dalam Pendidikan Menengah | % | 51.24783653 | 51.25 | 51.17 | 51.09 | 51.01 | 50.93 | 50.85 | 50.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Kelas SMA/MA | Rasio | 1 : 28 | 1 : 28 | 1:29 | 1:29 | 1:30 | 1:30 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Kelas SMK | Rasio | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 | 1 : 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa Miskin Penerima Beasiswa untuk Menempuh Pendidikan Menengah | % | 0 | 24 | 29,35 | 34,70 | 40,06 | 45,41 | 50,76 | 50,76 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya layanan pendidikan menengah di setiap kecamatan | % | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Tahun | % | 43.89 | 43.89 | 43.97 | 44.05 | 44.13 | 44.21 | 44.29 | 44.29 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio ketersediaan sekolah (SMA/MA/SMK) per Penduduk Usia 16-18 Tahun | Unit/10 000 penduduk usia sekolah | 14,71 | 14,28 | 14,12 | 13,96 | 13,91 | 13,75 | 13,57 | 13,57 |
|  |  |  |  |  | 5 | Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Non Formal | Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun | % | 97.82 | 97.9 | 98.09 | 98.36 | 98.63 | 98.7 | 99.17 | 99.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 7.1 | 7.1 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 7.19 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Layanan Pendidikan Kesetaraan dalam Rangka Menampung Siswa Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 33 | 50 | 100 | 100 |
|  |  |  | 3 | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | 6 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase TK/RA Terakreditasi A | % | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA Terakreditasi B | % | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 | 42.71 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA Terakreditasi C | % | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 |
|  |  |  |  |  | 7 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar | Persentase SD/MI Terakreditasi A | % | 2.97 | 2.97 | 3.31 | 3.65 | 3.99 | 4.33 | 4.67 | 4.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SD/MI Terakreditasi B | % | 61.01 | 61.1 | 61.011 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 | 61.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SD/MI Terakreditasi C | % | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi A | % | 21.9 | 21.9 | 23.8 | 25.7 | 27.6 | 29.5 | 31.4 | 31.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi B | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTs Terakreditasi C | % | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 | 27.62 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Lulusan SD/MI | % | 99.99 | 100 | 99.9 | 99.93 | 99.95 | 99.97 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Lulusan SMP/MTs | % | 98.13 | 99.17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa SD/MI yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 73.15 | 73.19264344 | 73.23 | 73.27 | 73.31 | 73.35 | 73.39 | 73.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa SMP/MTs yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 27.63341995 | 21.02936533 | 21.08 | 21.13 | 21.18 | 21.23 | 21.28 | 21.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa Baru SD/MI yang berasal dari TK/RA | % | 94.80918637 | 94.82 | 94.83 | 94.84 | 94.85 | 94.86 | 94.87 | 94.87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah SD/MI | % | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | % | 0.444892633 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.338 | 0.338 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan rencana pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kunjungan pengawas Sekolah ke satuan pendidikan. | % | 66.18 | 74 | 74.26 | 74.52 | 74.78 | 75.04 | 75.3 | 75.3 |
|  |  |  |  |  | 8 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Menengah | Persentase SMA/MA Terakreditasi A | % | 29.63 | 29.63 | 33.33 | 37.03 | 40.73 | 44.43 | 48.13 | 48.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMA/MA Terakreditasi B | % | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMA/MA Terakreditasi C | % | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi A | % | 15.87 | 15.87 | 19.05 | 22.23 | 25.41 | 28.59 | 31.77 | 31.77 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi B | % | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Program Keahlian SMK Terakreditasi C | % | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Angka Lulusan SMA/MA/SMK | % | 99.32056825 | 99.86478656 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Siswa SMA/MA/SMK yang Memperoleh Rerata Nilai Ujian Nasional ≥ 7,00 | % | 72.12270949 | 57.3310091 | 57.43 | 57.63 | 57.78 | 57.93 | 58.08 | 58.08 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK | % | 1.18076689 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.54 |
|  |  |  |  |  | 9 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal | Persentase Angka Lulusan Pendidikan Kesetaraan | % | 90.39 | 81.56 | 87.06 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 |
|  |  |  | 4 | Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 10 | Terpenuhinya Kebutuhan Pendidik | Rasio Siswa per Pendidik TK/RA | Rasio | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Pendidik SD/MI | Rasio | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 | 1 : 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Pendidik SMP/MTs | Rasio | 1 : 16 | 1 : 16 | 1 : 16 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 | 1:15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Pendidik SMA/MA | Rasio | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 | 1 : 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Siswa per Pendidik SMK | Rasio | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:13 | 1:13 |
|  |  |  |  |  | 11 | Meningkatnya Kualifikasi Akademik Pendidik | Persentase Pendidik TK/RA yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 35.14986376 | 41.79 | 42.34 | 42.89 | 43.44 | 44.33 | 45.22 | 45.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SD/MI yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 63.37035078 | 70.51 | 70,56 | 70,61 | 70,66 | 71.16 | 71.66 | 71.66 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 83.28651685 | 83.34 | 83.39 | 83.44 | 83.49 | 83.54 | 83.59 | 83.59 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMA/MA yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 91.44827586 | 91.5 | 91.55 | 91.6 | 91.65 | 91.7 | 91.75 | 91.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMK yang memenuhi standar kualifikasi akademik | % | 90.20979021 | 90.26 | 90.31 | 90.36 | 90.41 | 90.46 | 90.51 | 90.51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan guru SD/MI. | % | 90.87 | 92 | 92.6 | 93.2 | 93.8 | 94.4 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTS per Satuan mata pelajaran. | % | 78.1 | 78.5 | 79.7 | 80.9 | 82.1 | 83.3 | 84.5 | 84.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV yang telah memiliki sertifikat pendidik | % | 81.3 | 81.5 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 | 89 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan kualifikasi guru SMP/MTs. | % | 72.38 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 82.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan guru SMP/MTs untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. | % | 65.71 | 66 | 67.7 | 69.4 | 71.1 | 72.8 | 74.5 | 74.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan kualifikasi akademik Kepala SD/MI. | % | 82.96 | 83 | 84.2 | 85.4 | 86.6 | 87.8 | 89 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kualifikasi Akademik Kepala SMP/MTs | % | 90.48 | 90.5 | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 98 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kualifikasi Akademik pengawas sekolah/Madrasah. | % | 100 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
|  |  |  |  |  | 12 | Meningkatnya Profesionalisme Pendidik | Persentase Pendidik TK/RA yang memiliki sertifikat pendidik | % | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | 3.63 | 3.73 | 3.73 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SD/MI yang memiliki sertifikat pendidik | % | 30.8 | 30.9 | 31 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMP/MTs yang memiliki sertifikat pendidik | % | 50.09 | 5019 | 50.29 | 50.39 | 50.49 | 50..59 | 50.69 | 50.69 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMA/MA yang memiliki sertifikat pendidik | % | 44.79 | 44.89 | 44.99 | 45.09 | 45.19 | 45.29 | 45.39 | 45.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pendidik SMK yang memiliki sertifikat pendidik | % | 44.79 | 44.89 | 44.99 | 45.09 | 45.19 | 45.29 | 45.39 | 45.39 |
|  |  |  |  |  | 13 | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kependidikan | Besaran Pegawai Administrasi Sekolah | Orang | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Penilik Pendidikan Nonformal | Orang | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Pengawas Sekolah | Rasio | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 | 1 ; 17 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Pamong Belajar | Orang | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  |  |  | 5 | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 14 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase ruang belajar beserta perlengkapannya TK/RA yang kondisinya baik | % | 86.45 | 86.84 | 87.23 | 87.62 | 88.01 | 88.4 | 88.79 | 88.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA yang memiliki buku teks pembelajaran | % | 85 | 85.41 | 85.82 | 86.24 | 86.65 | 87.06 | 87.47 | 87.47 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA yang memiliki ruang kesehatan dan perlengkapannya | % | 23.66 | 24.08 | 25.11 | 26.14 | 27.17 | 28.19 | 29.22 | 29.22 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif dalam ruang | % | 85 | 85.41 | 85.82 | 86.24 | 86.65 | 87.06 | 88.747 | 88.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase TK/RA yang memiliki alat permainan edukatif luar ruang | % | 85 | 85.41 | 85.82 | 86.24 | 86.65 | 87.06 | 87.47 | 87.47 |
|  |  |  |  |  | 15 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar | Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisinya Baik | % | 85.00846979 | 86.42 | 87.83 | 89.25 | 90.66 | 92.07 | 93.48 | 93.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Ruang Kelas SMP yang Kondisinya Baik | % | 87.35294118 | 88.33 | 89.31 | 90.29 | 91.27 | 92.25 | 93.23 | 93.23 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SD/MI yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | % | 60 | 61.75 | 63.5 | 65.24 | 66.99 | 68.74 | 70.49 | 70.49 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMP/MTs yang Memiliki Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar Sarana Prasarana | % | 75.24 | 76.19 | 77.14 | 78.09 | 79.04 | 79.99 | 80..94 | 80..94 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan keterjangkauan satuan pendidikan SD/MI dan6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan Sarana prasarana kelas (SD/MI dan SMP/MTs) | % | 86.69 | 86.98 | 87.28 | 87.57 | 87.87 | 88.16 | 88.45 | 88.45 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan ketersediaan laboratorium IPA SMP dan MTs | % | 70 | 71.9 | 73.81 | 75.71 | 77.62 | 79.52 | 81.42 | 81.42 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Ketersediaan Ruang Guru | % | 98.47 | 98.67 | 98.97 | 99.26 | 99.56 | 99.85 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 16 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah | Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisinya baik | % | 95.3125 | 96.59 | 97.37 | 98.15 | 98.93 | 99.71 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase ruang kelas SMK yang kondisinya baik | % | 98.10725552 | 98.75 | 99.39 | 100 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMA/MA yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | % | 80 | 74.07 | 81.47 | 8.87 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SMK yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana prasarana | % | 80 | 81.82 | 86.37 | 90.92 | 95.47 | 95.47 | 95.47 | 95.47 |
|  |  |  |  |  | 17 | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memliki ruang belajar beserta perlengkapannya | % | 68,07 | 69,95 | 72,76 | 75,12 | 77,46 | 79,81 | 82,6 | 82,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase lembaga pendidikan nonformal yang memiliki alat dan bahan belajar | % | 71,36 | 73,71 | 76,06 | 78,40 | 80,75 | 83,10 | 85,45 | 85,45 |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 5 | Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat | 1 | Meningkatkan Jaringan, Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan | 1 | Meningkatnya Akses Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Yang Bermutu | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | % | 92,24 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan | % | 99,65 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani | % | 100 | 96 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Nifas | % | 94.56 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup | perkilomil | 88.92 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kunjungan Bayi | % | 96,9 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 98 | 99 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1) | % | 96,8 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Anak Balita | % | 89,84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani | % | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | permil | 0.987 | 0.98 | 0,980 | 0,983 | 0,986 | 0,989 | 0,992 | 0,992 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 12.21 | 14.2 | 14.11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup | permil | 13 | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 14 | 13.8 | 13.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB | % | 85,98 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin | % | 67,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD | % | 130.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Termasuk Potensi KLB ( Kejadian Luar Biasa ) dan Bencana | 2 | Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate) | % | 87,16 | 87 | >87 | >87 | >87 | >87 | >87 | >87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate) | % | 38.7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Prevalensi HIV pada Penduduk Usia Dewasa | % | 0.088 | 0.0039 | < 0,05 | <0,05 | < 0,05 | <0,05 | < 0,05 | <0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS | % | tda | 60 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita | % | 28.5 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penemuan Penderita Diare | % | 62.9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk) | 0 | 0.79 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk | 0 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk | % | 0.57 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
|  |  |  |  |  |  |  | CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue) | % | 0 | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) | % | 99.65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun | kasus | 5 kasus | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) | ≥2 (4 kasus) |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | % | 96.15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penderita diare Yang ditangani | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 3 | Meningkatkan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat | 3 | Meningkatnya Gizi Masyarakat | Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan) | % | 11.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan) | % | 0.04 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 4 | Menjamin Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehataan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar | 4 | Meningkatnya Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan | % | 98.6 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  | 5 | Menjamin Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan | 5 | Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan di semua Tingkatan Pelayanan Kesehatan | Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar | % | tda | tda | 65 | 66.25 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi | % | tda | tda | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas | Rasio | 1 : 32412 | 1/30.000 | 1/33.000 | 1/33.000 | 1/32.000 | 1/31.000 | 1/31.000 | 1/30.000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | % | 50.63 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelayanan RSUD: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOR | % | 73.73 | 70 | 65 | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | LOS | hari | 4.24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOI | hari | 1.16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | GDR | ‰ | 37.3 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  | NDR | ‰ | 19.06 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Kinerja Pelayanan BLUD | Strata | - | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat | Sehat |
|  |  |  |  |  |  |  | Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD | - | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus | Lulus |
|  |  |  | 6 | Meningkatkan Penyehatan Lingkungan | 6 | Meningkatnya Lingkungan Sehat | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan | % | tda | tda | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan | % | tda | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban | % | 63.2 | 79.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Bersih yang Layak di Perkotaan | % | tda | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Bersih yang Layak di Pedesaan | % | tda | 50 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar | % | 99.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Desa Siaga Aktif | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri | % | 42.6 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Rumah Tangga Sehat | % | 74.1 | 74.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 7 | Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga Berencana | 7 | Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga | Meningkatnya kualias kesejahteraan keluarga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | a. Keluarga Pra Sejahtera | % | 22,86 | 21,32 | 21,32 | 20,58 | 20,48 | 20,26 | 20,22 | 20,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | b. Keluarga Sejahtera I | % | 11,3 | 8,05 | 8,05 | 7,87 | 7,15 | 7,24 | 7,23 | 7,23 |
|  |  |  |  |  |  |  | c. Keluarga Sejahtera II | % | 17,33 | 21,81 | 21,81 | 22,01 | 23,16 | 23,17 | 23,19 | 23,19 |
|  |  |  |  |  |  |  | d. Keluarga Sejahtera III | % | 45,38 | 45,57 | 45,57 | 44,93 | 45,23 | 45,21 | 45,22 | 45,22 |
|  |  |  |  |  |  |  | e. Keluarga Sejahtera III plus | % | 3,11 | 3,23 | 3,23 | 3,61 | 3,98 | 4,12 | 4,14 | 4,14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 8 | Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun | % | 4,00 | 3,25 | 3,10 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif | % | 83,02 | 83,00 | 83,2 | 83,4 | 83,6 | 83,8 | 84 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need) | % | 7,55 | 6,00 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,05 | 5,05 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB | % | 80,58 | 81,00 | 81,05 | 81,1 | 81,16 | 81,19 | 81,25 | 81,25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) yang Ber-KB | % | 84,52 | 85,00 | 85,5 | 85,6 | 85,75 | 85,8 | 86 | 86 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan | Rasio | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 5 | 1 : 4 | 1 :4 | 1 :4 | 1 : 2 | 1 : 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan | Rasio | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria | % | 2,89 | 3,00 | 3,2 | 3,33 | 3,34 | 3,54 | 3,55 | 3,55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Terkendalinya Pertumbuhan Jumlah Penduduk | % | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,6 | 0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru | 0 | 19.428 | 17.274 | 14.073 | 14.065 | 14.059 | 14.057 | 14.055 | 14.055 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | % | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH | 6 | Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik | 1 | Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah | Besaran Penelitian dan Pengembangan | dokumen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah | Rasio | 0.166666667 | 0.166666667 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah | % | 0.016666667 | 0.016666667 | 0,0175 | 0,0175 | 0,018 | 0,018 | 0,0185 | 0,0185 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD | % | n.a | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD | % | n.a | n.a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase program SKPD di Luar RPJMD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2 | Meningkatkan Tertib Administrasi Pertanahan | 2 | Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan | Persentase Aset Tanah Pemerintah yang Bersertifikat | % | 75,6 | 80,7 | 84,5 | 88,4 | 92,3 | 96,13 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penggantian Tanah Pemerintah Desa yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten | % | 5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 20 |
|  |  |  | 3 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme | 3 | Meningkatnya Kemampuan, Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Aparatur | Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Fungsional | % | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase PNS yang Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang atau Jasa | % | 1.858736059 | 1.904073271 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan | % | 50 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS | % | 79.41176471 | 84.61538462 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pengisian Jabatan Struktural PNS yang Kosong | % | 81 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | persentase PNS Lulusan S1 | % | 40 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase PNS Lulusan S2/ S3 | % | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu | % | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS Tepat Waktu | % | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Mengalami Kasus | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pengisian Jabatan Kepala Desa yang Kosong | % | 100 | 100 | 92.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang Kosong | % | 98.1 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  |  |  | 4 | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | 4 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan | % | 0 | 64 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang Menyusun Standar Pelayanan Publik | % | 2.678571429 | 4.107142857 | 7 | 15 | 45 | 70 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase SKPD, Unit Pelayanan, dan Satuan Pendidikan yang telah Memiliki SOP | % | 1.240310078 | 2.480620155 | 8 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat | Kriteria | B | B | B | B | B | B | B | B |
|  |  |  |  |  |  |  | Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Kriteria | C | CC | CC | B | B | B | B | B |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Ketepatan Waktu SKPD dalam Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIP dan TAPKIN) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Jumlah SKPD yang Menyampaikan DURP dengan tepat waktu | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Keberhasilan pengadaan barang/jasa | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti Terhadap Jumlah Total Peraturan Daerah dalam 1 (Satu) Tahun | % | 96,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun | % | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Ketersediaan sarana dan prasarana kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran kerjasama daerah | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pelaksanaan SPM | % | 5,8 | 8,3 | 72,4 | 91,7 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
|  |  |  |  |  | 5 | Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase Tersusunnya dokumen pelaporan daerah | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Tertib Administrasi di tingkat Kelurahan | % | 10 | 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pembinaan Administrasi Desa | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 5 | Meningkatkan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah | 6 | Meningkatnya Kapasitas Kemampuan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rasio Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Potensi Pendapatan Daerah | % | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Kriteria | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|  |  |  |  |  |  |  | Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah | % | 8,75 | 8,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 7 | Meningkatnya Tertib Administrasi Aset Pemerintah Daerah | Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD | % | 70 | 75 | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 80 |
|  |  |  | 6 | Meningkatkan Tertib Pengelolaan Kearsipan | 8 | Meningkatnya Tertib Pengelolaan Kearsipan | Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku | % | 63 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 7 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | 9 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya | Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) | % | 21.61 | 39.54 | 53.18 | 65.08 | 76.99 | 88.89 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | % | 86.56 | 2.39 | 18.15 | 22.84 | 27.65 | 32.58 | 37.63 | 37.63 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | % | 40.43 | 42.65 | 47.94 | 51.56 | 56.13 | 59.79 | 63.46 | 67.01 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian | % | 1.83 | 1.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat | 10 | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Cakupan Jenis Perizinan yang Memiliki Standar Pelayanan Publik atau Standar Operasional Prosedur | % | 0 | 25 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam Waktu 6 (Enam) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap | Hari | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  | 11 | Meningkatnya Investasi | Laju Investasi | % | 19,17 | 11,16 | 18,77 | 16,28 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
|  |  |  |  |  |  |  | Nilai Investasi | Rupiah | 123,457 M | 85,692 M | 160 M | 165 M | 170 M | 170 M | 170 M | 170 M |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran jumlah Investor | investor | 503 | 684 | 874 | 1074 | 1284 | 1504 | 1734 | 1734 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran Promosi peluang investasi dan kemitraan dengan dunia usaha | Kali/tahun | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal | unit | 17 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  | Besaran implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Informasi secara Elektronik | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | 9 | Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan | 12 | Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan | Rasio Pengunjung Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk | Rasio | 55 | 60 | 64 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  | Persentase Peminjam Buku Perpustakaan Terhadap Jumlah Pengunjung | % | 35 | 65 | 70 | 73 | 79 | 83 | 87 | 90 |
|  |  |  | 10 | Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah | 13 | Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan dan Data Statistik Daerah | Besaran ketersediaan data statistik | dokumen | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  |  |  | 11 | Meningkatkan Pelayanan Komunikasi dan Informasi | 14 | Meningkatnya Akses atas Komunikasi dan Informasi | Rasio Akses Internet di Ruang Publik | rasio | 5 | 9 | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional | kali | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal | kali | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar Ruang | kali | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa | kali | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru | hari | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | % | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi setiap Tahun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog | % | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Digital | % | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  | 12 | Meningkatkan Kualitas Teknologi Informasi dan Komunikasi | 15 | Terwujudnya Pengelolaan e-Government | Cakupan Jaringan Sistem Informasi e-Government | % | 5 | 9 | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cakupan terbangunnya Integrasi Jaringan Informasi dan Komunikasi | % | 5 | 9 | 15 | 35 | 55 | 75 | 100 | 100 |

Dari tabel diatas maka diperoleh informasi jumlah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah untuk masing masing Misi Daerah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.2

Jumlah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2013-2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN |
| 1 | Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan | 11 | 23 |
| 2 | Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera | 13 | 21 |
| 3 | Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan | 9 | 10 |
| 4 | Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal | 5 | 17 |
| 5 | Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat | 7 | 8 |
| 6 | Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik | 12 | 15 |
|  | Jumlah | 57 | 94 |

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 memiliki 57 Tujuan Pembangunan Daerah yang ingin dicapai dan dengan 94 sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan untuk dicapai.